



## SINOPSIS

Judul Buku: Jangan Lepas Papua. Mencermati Pelaksanaan Operasi Militer di Papua. Sebuah Kajian Hukum Humaniter dan Hukum HAM

Pengarang: Laksda ( Purn) Soelaman B. Ponto, ST , MH

NKRI tak bisa ditawar! NKRI Harga Mati! Jargon ini menjadi pemersatu yang sering diteriakkan ketika kampanye pemilihan umum (pemilu) berlangsung. NKRI memang sudah final. Namun, sejak Timor Timur (Timtim) melakukan referendum dan akhirnya lepas dari Indonesia tahun 1999, keutuhan NKRI mengalami gangguan. Sejak saat itu jargon tersebut menemukan momentumnya untuk terus dikumandangkan.

Memang keberhasilan pencapaian perdamaian di Aceh memberikan sinyal bahwa dengan pendekatan win-win solution dan asas saling menghormati antara pemerintah Indonesia dan kaum. separatis, konflik berkepanjangan pada akhirnya dapat diselesaikan. Namun pola tersebut tidak dapat diselesaikan dengan sederhana untuk mencapai perdamaian di daerah konflik bersenjata lainnya termasuk juga untuk mengatasi konflik di Papua.

Gerakan separatisme di Papua (OPM) sepuluh tahun lebih tua dari GAM.(Gerakan Aceh Merdeka). OPM. dibentuk 1965 sedangkan GAM.di tahun 1976. Namun ketika konflik Aceh telah selesai konflik di Papua masih sering timbul. Padahal pemerintah dalam hal ini TNI melakukan penanganan yang sama dengan mengirimkan tentara untuk menghadapi kelompok bersenjata.

Hanya saja dilihat dari Hukum. Internasional gerakan separatis di Aceh dan dengan di Papua sangat berbeda. Di Aceh jelas pemimpinnya, jelas wilayah yang dikuasai kaum separatisme tetapi di Papua berbeda. Di Papua meskipun ada pemimpinnya, tetapi pemimpinnya banyak karena ada beberapa kelompok gerakan bersenjata.

Buku ini telah melewati hasil pengkajian di hadapan forum akademisi. Dalam buku ini dijelaskan jika negara melakukan pelanggaran HAM maka Papua justru bisa lepas dari NKRI.